

## PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAKIP BERBASIS AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DI KALIMANTAN TENGAH

Nadia Dara Amirue<sup>\*1</sup>, Jhon Lis Berger<sup>2</sup>, M. Ichsan Diarsyad<sup>3</sup>, Heru Pribowo<sup>4</sup>

<sup>1,3,4</sup> Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

<sup>2</sup> Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Palangka Raya, Indonesia

\*Corresponding Author: [nadiadaraamirue@gmail.com](mailto:nadiadaraamirue@gmail.com)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 04 April 2026</p> <p>Revised : 01 Mei 2026</p> <p>Accepted : 03 Juni 2026</p> <p>Publication : 30 Juni 2026</p>	<p><b>Abstract:</b> <i>The Impactful Independent Internship Program (MBKM) at the Bureau of Government and Regional Autonomy, Administrative Division of the Regional Secretariat of Central Kalimantan Province carried out this community service project for four months, from January 22 to May 22. This activity aimed to improve the quality of performance report preparation through more systematic and measurable data management. A qualitative descriptive method was employed through participant observation, unstructured interviews, and examination of institutional performance records. The students assisted in managing government administration, collecting performance data, and preparing physical and financial realization reports. The results of the activity indicated that the implementation of responsibility accounting through the identification of responsibility centers, measurement of performance indicators, and verification of supporting documents was able to improve the accuracy and quality of LAKIP preparation. This activity also contributed to enhancing students' competencies in public sector accounting and improving the administrative effectiveness of government institutions.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> Responsibility Accounting, LAKIP, Performance Accountabilit, Public Sector Accounting, MBKM Internship</p>	
<p><b>Kata Kunci:</b> Akuntansi Pertanggungjawabana, LAKIP, Akuntabilitas Kinerja, Akuntansi Sektor Publik, Magang MBKM</p>	
<p><b>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</b></p> 	<p><b>Abstrak:</b> Program Magang Mandiri Berdampak (MBKM) di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan proyek pengabdian masyarakat ini selama empat bulan, dari 22 Januari hingga 22 Mei. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja melalui pengelolaan data yang lebih sistematis dan terukur. Melalui observasi partisipan, wawancara tidak terstruktur, dan pemeriksaan catatan kinerja instansi, teknik deskriptif kualitatif digunakan. Mahasiswa membantu pengelolaan administrasi pemerintahan, pengumpulan data kinerja, serta penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban melalui identifikasi pusat pertanggungjawaban, pengukuran indikator kinerja, dan verifikasi dokumen pendukung mampu meningkatkan ketepatan dan kualitas penyusunan LAKIP. Kegiatan ini juga mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa dalam bidang akuntansi sektor publik dan efektivitas administrasi instansi pemerintah.</p>

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab memerlukan sistem akuntabilitas kinerja yang kuat sebagai wujud nyata dari tata kelola yang baik. Pemerintah sebagai pemegang amanah publik berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya negara secara transparan, efektif, dan efisien kepada masyarakat. Dalam sektor publik, penguatan sistem akuntansi pemerintahan menjadi fondasi utama dalam mendukung akuntabilitas publik yang efektif (Hien et al., 2025). Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (LAKIP), sebuah laporan yang merinci pencapaian program dan kegiatan lembaga pemerintah sepanjang satu periode anggaran, adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan kinerja.

Kewajiban penyusunan LAKIP dilandasi oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara menyeluruh. Menurut (Bastian, 2010), Proses pengumpulan, pendokumentasian, pengelolaan, dan pelaporan data keuangan untuk organisasi publik yang berfungsi sebagai dasar akuntabilitas publik dan pengambilan keputusan dikenal sebagai akuntansi sektor publik.. Penelitian (Peilouw et al., 2023) Studi ini menunjukkan bagaimana akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah dipengaruhi oleh penggunaan akuntansi sektor publik dan kualitas pelaporan keuangan. Perencanaan, penganggaran, implementasi, pelaporan, dan penilaian kinerja semuanya terintegrasi ke dalam siklus manajemen pemerintah yang terpadu oleh sistem ini. Namun, terdapat juga sejumlah hambatan kelembagaan terhadap implementasi SAKIP di pemerintah daerah, termasuk legislasi yang tidak seragam, budaya birokrasi yang tidak sepenuhnya berorientasi pada kinerja, dan pelaporan kinerja yang buruk (Salomo & Rahmayanti, 2023). Selain itu, efektivitas pengukuran kinerja sektor publik juga sangat dipengaruhi oleh kejelasan indikator kinerja dan sistem pengendalian internal organisasi (Febriyanti et al., 2024 ; Rahmasari & Setiawan, 2022).

Dalam perspektif akuntansi, penyusunan LAKIP berkaitan erat dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban (*responsibility accounting*), yaitu sistem yang digunakan untuk mengukur hasil kerja setiap pusat pertanggungjawaban berdasarkan target dan informasi yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Penerapan akuntansi pertanggungjawaban di sektor publik berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana publik melalui pelaporan yang transparan, alokasi anggaran yang

jelas, dan mekanisme pengawasan yang efektif (Mediaty et al., 2025). Dengan demikian, kualitas LAKIP tidak hanya mencerminkan capaian program kerja, tetapi juga menunjukkan tingkat akuntabilitas dan pengendalian internal instansi pemerintah.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab atas administrasi wilayah, otonomi daerah, dan pemerintahan umum. Instansi ini masih menghadapi sejumlah tantangan dalam menyusun LAKIP (Laporan Penilaian Kinerja Daerah), seperti kebutuhan untuk lebih menyelaraskan dokumen perencanaan dengan implementasi kinerja, kurangnya sumber daya manusia yang berpengetahuan tentang teknik pelaporan kinerja berbasis akuntansi, dan pengelolaan data kinerja yang belum sepenuhnya sistematis.

Beberapa kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa mahasiswa dapat berkontribusi dalam mendukung administrasi pemerintahan daerah melalui program MBKM. (Hoiriah, 2025) juga menunjukkan bahwa mahasiswa MBKM di instansi pemerintah daerah terlibat aktif dalam kegiatan administrasi umum dan pengelolaan dokumen pemerintahan. Sementara itu, (Novita et al., 2023) menemukan bahwa mahasiswa akuntansi yang melaksanakan magang di Sekretariat Daerah berkontribusi dalam penginputan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sedangkan (Nikmah & Putri, 2024) menyatakan bahwa program magang MBKM mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa sekaligus memberikan manfaat bagi instansi mitra. Namun, kajian tersebut belum secara khusus mengaitkan kegiatan magang dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penyusunan LAKIP.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui program Magang Mandiri Berdampak dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan menerapkan konsep akuntansi pertanggungjawaban sebagai kerangka analisis dalam pendampingan penyusunan LAKIP. Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan proses penyusunan LAKIP di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah; (2) menerapkan konsep akuntansi pertanggungjawaban dalam pendampingan penyusunan LAKIP; dan (3) mengidentifikasi kendala serta solusi dalam proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## **METODE PELAKSANAAN**

Program Magang Mandiri Berdampak dalam kerangka MBKM menjadi wadah pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, berlangsung selama empat bulan penuh mulai 22

Januari hingga 22 Mei 2026 di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Program MBKM dipilih karena memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam aktivitas administrasi dan pelaporan kinerja instansi pemerintah sehingga mampu menghubungkan teori akuntansi sektor publik dengan praktik di lapangan (Fatimah, 2025).

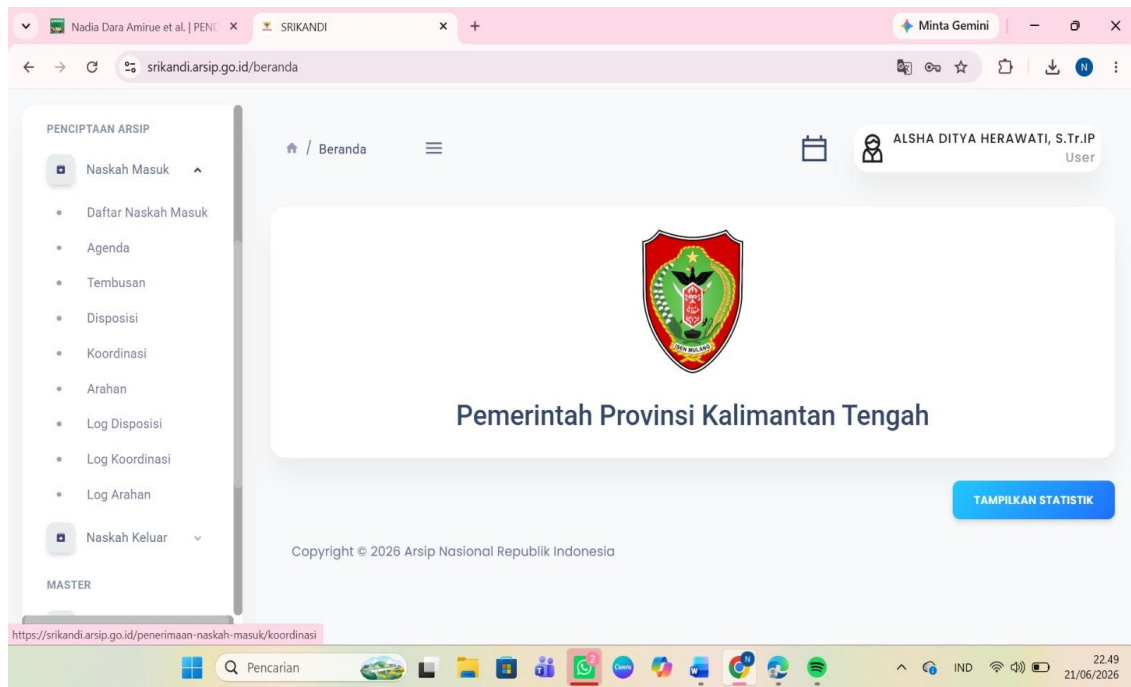
Proyek pengabdian masyarakat tersebut mencakup wawancara tidak terstruktur, observasi partisipatif, dan teknik dokumentasi sebagai bagian dari metodologi deskriptif kualitatif. Partisipasi langsung siswa dalam proses pembuatan LAKIP, memasukkan data realisasi keuangan dan fisik, mendistribusikan surat, dan mengkonfirmasi catatan kinerja pendukung merupakan cara observasi partisipatif dilakukan. Observasi partisipatif, menurut (Creswell & Poth, 2018), memungkinkan peneliti untuk memahami peristiwa yang diamati secara lebih menyeluruh dan kontekstual.

Data kegiatan diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan Kepala Subbagian Tata Usaha dan staf terkait, serta dokumentasi dokumen LAKIP, LPJ Triwulan IV, laporan realisasi keuangan, dan perjanjian kinerja. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: (1) orientasi dan identifikasi kebutuhan penyusunan LAKIP; (2) pendampingan teknis penginputan data dan administrasi persuratan; (3) pendataan dan verifikasi dokumen kinerja; serta (4) dokumentasi dan evaluasi hasil kegiatan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengaitkan temuan lapangan pada konsep akuntansi pertanggungjawaban. Tingkat ketercapaian kegiatan diukur secara kualitatif berdasarkan ketepatan pengelolaan dokumen pendukung LAKIP, kesesuaian data realisasi kinerja, serta peningkatan pemahaman mahasiswa dan aparatur terhadap proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

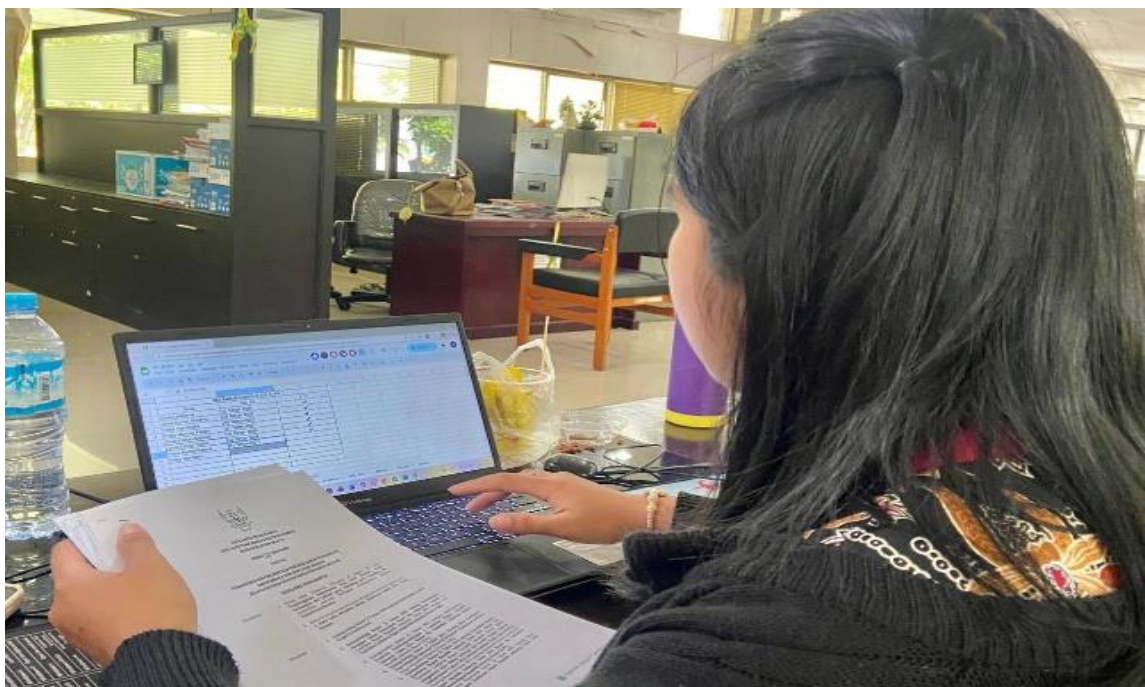
## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui pendampingan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kegiatan dilakukan melalui penginputan data realisasi fisik dan keuangan, pengarsipan dokumen, administrasi persuratan melalui aplikasi SRIKANDI, serta verifikasi dokumen pendukung kinerja.



Gambar 1. Aplikasi SRIKANDI

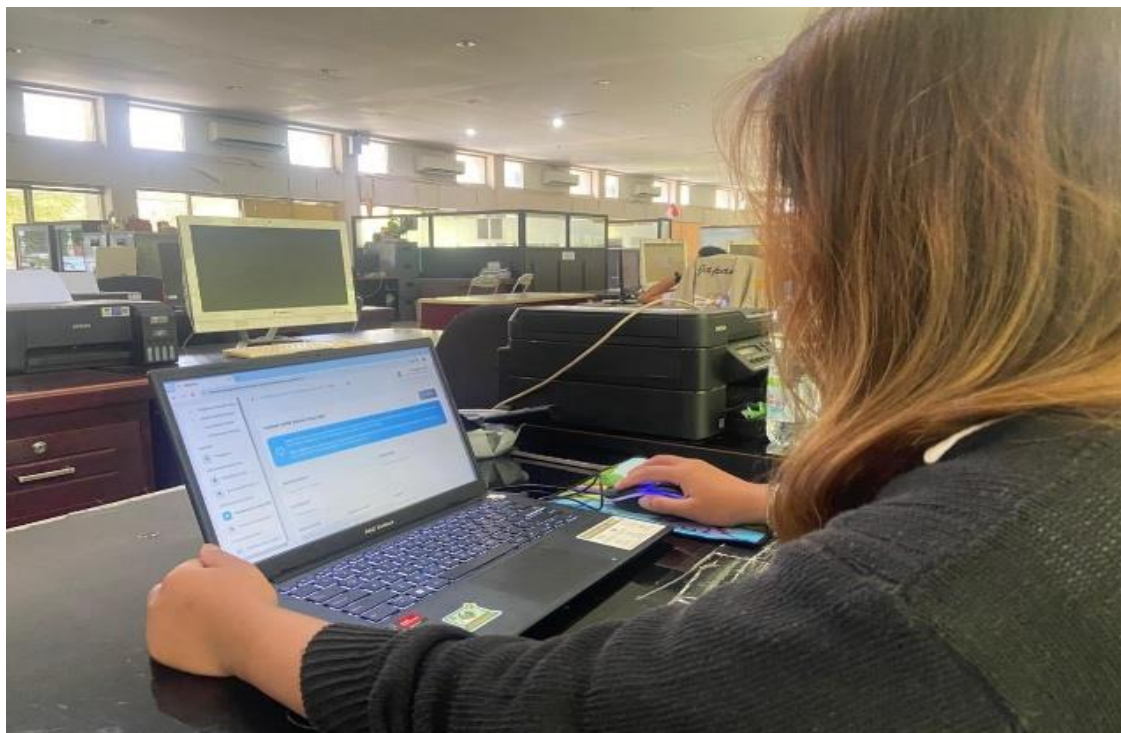
Proses penyusunan LAKIP (Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dilakukan dalam beberapa tahapan berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk membuat laporan pencapaian kinerja, langkah pertama adalah mengumpulkan data realisasi keuangan dan fisik dari setiap sub-bagian. Pelaksanaan program, pemanfaatan anggaran, dan pencapaian metrik kinerja yang ditentukan dalam dokumen perencanaan semuanya termasuk dalam data ini.



Gambar 2. Kegiatan Penginputan Data Realisasi Fisik dan Keuangan LAKIP

Gambar 2. menunjukkan proses penginputan data realisasi fisik dan keuangan laporan tahunan Triwulan IV sebagai bagian dari pendampingan penyusunan LAKIP di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu, mahasiswa juga membantu proses administrasi persuratan melalui aplikasi SRIKANDI, mulai dari pencatatan surat masuk dan surat keluar hingga pengarsipan dokumen elektronik. Penelitian (Ali et al., 2025) menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SRIKANDI pada instansi pemerintah daerah berkontribusi dalam mendukung transformasi digital kearsipan dan tertib administrasi pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan (Lestari, 2025) yang menyatakan bahwa transformasi digital dalam akuntansi sektor publik mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi pengelolaan informasi pemerintahan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung tertib administrasi dan mempermudah proses penelusuran dokumen pendukung laporan kinerja.



Gambar 3. Administrasi Persuratan melalui Sistem SRIKANDI

Gambar 3 menunjukkan kegiatan pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipan dokumen elektronik menggunakan aplikasi SRIKANDI.

Kegiatan pendampingan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan administrasi dan penyusunan LAKIP. Penginputan data menjadi lebih terorganisir,

pengarsipan dokumen lebih tertata, serta verifikasi dokumen pendukung kinerja menjadi lebih sistematis.

**Tabel 1. Dampak Kegiatan Pendampingan**

No	Bentuk Kegiatan	Uraian Kegiatan
1	Penginputan Data Realisasi	Input data realisasi fisik dan keuangan laporan tahunan Triwulan IV
2	Rekapitulasi Perjalanan Dinas	Penyusunan rekap perjalanan dinas Tahun 2025
3	Administrasi Persuratan	Pencatatan surat masuk dan surat keluar melalui SRIKANDI
4	Pengarsipan Dokumen	Pengelolaan dan penyusunan arsip dokumen pendukung
5	Pendataan Pemerintahan Daerah	Penginputan data administrasi kependudukan dan kelembagaan daerah

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan administrasi dan penyusunan dokumen kinerja setelah kegiatan pendampingan dilaksanakan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyusunan LAKIP telah mencerminkan penerapan konsep akuntansi pertanggungjawaban melalui pembagian tugas berdasarkan pusat pertanggungjawaban pada masing-masing subbagian. Setiap unit kerja bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator kinerja dan penyediaan dokumen pendukung laporan. Kondisi ini sejalan dengan (Mardiasmo, 2018) yang menyatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban digunakan untuk mengukur hasil setiap pusat pertanggungjawaban berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Penerapan konsep tersebut juga terlihat pada proses verifikasi data realisasi fisik dan keuangan sebelum penyusunan laporan final. Temuan ini sejalan dengan (Mediaty et al., 2025) yang menyatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban berperan dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui pelaporan yang transparan dan mekanisme pengawasan yang efektif. Selain itu, (Grossi et al., 2020) menyatakan bahwa sistem akuntansi, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas merupakan elemen yang saling berkaitan dalam organisasi sektor publik.

Kualitas penyusunan LAKIP juga dipengaruhi oleh ketepatan pengelolaan dokumen, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal. (Rahmasari & Setiawan, 2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selain itu, (Febriyanti et al., 2024) menegaskan bahwa efektivitas pengukuran kinerja sektor publik dipengaruhi oleh kejelasan indikator kinerja.

Program MBKM memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun instansi mitra. Keterlibatan mahasiswa membantu efektivitas pekerjaan administratif dan pengelolaan dokumen pendukung. Kondisi tersebut sejalan dengan (Primasari & Anggraeni, 2021) yang menyatakan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam administrasi pemerintahan dapat memperkuat kompetensi praktis berbasis pengabdian. Hasil kegiatan ini juga sejalan dengan (Nikmah & Putri, 2024) yang menyatakan bahwa program MBKM mampu meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi instansi mitra. Selain itu, (Fatimah, 2025) menegaskan bahwa program magang pada instansi pemerintah menjadi sarana efektif untuk menghubungkan teori akuntansi sektor publik dengan praktik administrasi pemerintahan secara langsung.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian melalui Magang Mandiri Berdampak (MBKM) di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan kontribusi nyata dalam pendampingan penyusunan LAKIP berbasis akuntansi pertanggungjawaban. Ketiga prinsip akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan, yakni pemetaan pusat pertanggungjawaban, pengukuran kinerja melalui indikator yang terukur, serta pengecekan kelengkapan dokumen pendukung, secara nyata mendorong peningkatan akurasi dan kualitas data dalam penyusunan LAKIP.

Mahasiswa akuntansi mampu memberikan nilai tambah yang signifikan melalui kontribusi konkret dalam input data realisasi, rekapitulasi perjalanan dinas, administrasi persuratan, serta pendataan administrasi pemerintahan daerah. Kegiatan ini sekaligus memperkaya kompetensi profesional mahasiswa di bidang akuntansi sektor publik, khususnya dalam memahami dan mempraktikkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah secara langsung dan kontekstual.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atas kesempatan dan bimbingan selama pelaksanaan kegiatan magang. Terima kasih juga kepada Universitas Palangka Raya atas dukungan penuh terhadap program Magang Mandiri Berdampak dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M. K., Gofur, A., & Aditya, H. D. (2025). TRANSFORMASI DIGITAL KEARSIPAN MELALUI PENERAPAN APLIKASI SRIKANDI PADA BIDANG SEKRETARIAT BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1, 2074–2079.
- Bastian, I. (2010). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK: SUATU PENGANTAR*. Erlangga
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *QUALITATIVE INQUIRY AND RESEARCH DESIGN (4th ed.)*. SAGE
- Fatimah, D. N., R. A. U., R. S. M., & H. R. (2025). PERAN MAGANG DALAM MENYIAPKAN MAHASISWA AKUNTANSI SYARIAH UNTUK DUNIA KERJA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3
- Febriyanti, D., Widianingsih, I., Sumaryana, A., & Buchari, R. A. (2024). THE TYPOLOGY AND DETERMINANT OF PERFORMANCE MEASUREMENT FOR PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS: A LITERATURE REVIEW. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2315681>
- Grossi, G., Kallio, K. M., Sargiacomo, M., & Skoog, M. (2020). ACCOUNTING, PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEMS AND ACCOUNTABILITY CHANGES IN KNOWLEDGE-INTENSIVE PUBLIC ORGANIZATIONS: A LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(1), 256–280. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-02-2019-3869>
- Hien, N. T. T., Hai, P. H., Bui, T. T. T., & Tuan, D. A. (2025). STRUCTURAL EQUATION MODELING OF FACTORS AFFECTING ACCOUNTABILITY-BASED ACCOUNTING IN PUBLIC SECTOR ENTITIES. *Emerging Science Journal*, 9(4), 2162–2178. <https://doi.org/10.28991/ESJ-2025-09-04-023>
- Hoiriah, M. (2025). PENGABDIAN MAHASISWA MBKM MAGANG DALAM KEGIATAN LAYANAN ADMINISTRASI UMUM KEPEGAWAIAN DISPARBUDPORA KOTA PALANGKA RAYA. *Global Journal of Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 365–372. <https://doi.org/10.59435/gjpm.v3i2.1587>

- Lestari, P. A. (2025). TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN THE DIGITAL ERA: INSIGHTS FROM PUBLIC SECTOR ACCOUNTING. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, 3(3), 195–208. <https://doi.org/10.61194/ijat.v3i3.864>
- Mardiasmo. (2018). AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Penerbit Andi.
- Mediaty, M., Usman, A., Yusuf, M. S. K., & Sandy, K. N. (2025). ENHANCING GOVERNMENT ACCOUNTABILITY THROUGH RESPONSIBILITY ACCOUNTING: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Marginal Journal of Management Accounting General Finance and International Economic Issues*, 4(4), 904–919. <https://doi.org/10.55047/marginal.v4i4.1790>
- Nikmah, K., & Putri, A. A. (2024). PERAN MAHASISWA MAGANG MBKM DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK KHAIRUL. *Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 133–140.
- Novita, R., Adistia Ningsih, R., Sartika Sari, S., Fiernanda, V., Usmaniyah, W., Agus Faisol, I., et al. (2023). AKTIVITAS PENGISIAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Altifani*, 3(4), 545–552. <https://doi.org/10.25008/altifani.v3i4.448>
- Peilouw, C. T., Dayanti Oktavia, D., Wulandari, A. A., & Latuan, C. F. (2023). PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN KUPANG).
- Primasari, N. H., & Anggraeni, D. (2021). PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA MELALUI PELATIHAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK BAGI SISWA SMK TRIGUNA 1956 JAKARTA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Abdimas*, 1(1), 12–17.
- Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2022). MATURITY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM, THE CAPABILITY OF INTERNAL AUDITORS, AND PERFORMANCE ACCOUNTABILITY IN LOCAL GOVERNMENTS. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8, 159–176. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.830>

Salomo, R. V., & Rahmayanti, K. P. (2023). PROGRESS AND INSTITUTIONAL CHALLENGES ON LOCAL GOVERNMENTS PERFORMANCE ACCOUNTABILITY SYSTEM REFORM IN INDONESIA. SAGE Open, 13(4). <https://doi.org/10.1177/21582440231196659>